

## THE PRICE CONTROVERSY OF MINYAKITA: MEDIA, POLICY, AND PUBLIC OPINION PERSPECTIVES

Retno Dewi Zulaikah  
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
[retnodewizulaikah@uinsatu.ac.id](mailto:retnodewizulaikah@uinsatu.ac.id)

Samsudin  
Dosen STAI Luqman al-Hakim Surabaya  
[Samsudinstail0@gmail.com](mailto:Samsudinstail0@gmail.com)

Lukita Permanasari  
IAI al-Azhar Gresik  
[lukita@istaz.ac.id](mailto:lukita@istaz.ac.id)

### ABSTRACT

The price controversy surrounding Minyakita has remained a persistent public concern. As a subsidized cooking oil product designed to assist low-income communities, Minyakita is often unavailable at the government-set Maximum Retail Price (MRP). This situation raises significant questions about the effectiveness of distribution policies and food governance in Indonesia. Various factors, including long distribution chains and limited inter-agency coordination, serve as major obstacles to maintaining price stability and product availability in the market.

This study aims to analyze the roles of mass media, government policies, and public opinion in shaping the dynamics of the controversy. Using a qualitative approach with descriptive and case study methods, the research draws on primary data from in-depth interviews, field observations, and secondary data from news articles and policy documents.

The findings indicate that media coverage tends to be fragmented and focused on sensational aspects, reinforcing negative public perceptions of the government. The implementation of the Maximum Retail Price (MRP) policy is hindered by the lengthy distribution chain and inadequate logistics infrastructure. Additionally, the allocation of export levy funds for CPO prioritizes biodiesel subsidies over Minyakita production subsidies, leading to supply instability. Public opinion, influenced by policy inconsistencies, has eroded trust in the government, while market stability is particularly disrupted in rural areas.

The study concludes that reforms in distribution policies, optimization of producer incentives, increased transparency, and improvement in the media's role in delivering data-driven information are essential to resolving this controversy. Recommendations include optimizing distribution infrastructure, reallocating export levy funds, and developing consistent public communication strategies. This research is expected to contribute to strengthening the national food system and enhancing public trust in the government.

Keywords: Minyakita, distribution policy, mass media, public opinion, food governance

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Polemik harga Minyakita telah menjadi perhatian publik yang tak

kunjung reda. Sebagai produk minyak goreng bersubsidi yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, Minyakita sering kali tidak tersedia sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>1 2</sup> Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas kebijakan distribusi dan tata kelola pangan di Indonesia.<sup>34</sup> Dalam praktiknya, berbagai faktor, mulai dari panjangnya rantai distribusi hingga minimnya koordinasi antarlembaga, menjadi penghambat utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan produk di pasar.<sup>5</sup>

Media massa memainkan peran penting dalam membingkai polemik ini. Berita yang disajikan oleh media tidak hanya memengaruhi opini publik tetapi juga membentuk persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pemerintah.<sup>6</sup> Sayangnya, pemberitaan yang tidak selalu komprehensif sering kali memperkeruh situasi, terutama ketika informasi yang disampaikan terfragmentasi atau bias. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi masyarakat, realitas di lapangan, dan respons pemerintah.

Kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi masalah ini juga tidak lepas dari kritik. Misalnya, tuduhan bahwa kebijakan wajib pungut menjadi penyebab utama tingginya harga Minyakita dinilai tidak memiliki dasar yang kuat. Faktanya, isu utama justru terletak pada panjangnya rantai distribusi dan kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mendukung efisiensi distribusi. Kritik juga diarahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap tidak mampu menjalankan fungsi sebagai ujung tombak stabilisasi harga, karena keterbatasan logistik dan minimnya insentif untuk menjalankan peran tersebut secara optimal.<sup>7</sup>

Masalah mendasar lainnya adalah ketidakstabilan pasokan akibat minimnya insentif bagi produsen swasta dalam memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).<sup>8 9</sup> Dana pungutan ekspor CPO yang lebih banyak dialokasikan untuk subsidi biodiesel dianggap tidak mendukung keberlanjutan produksi dan distribusi Minyakita.<sup>10</sup> Reformasi kebijakan yang lebih inklusif, termasuk pemberdayaan petani kecil melalui koperasi, menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan ekosistem minyak goreng yang berkelanjutan.

Transparansi dan konsistensi kebijakan juga menjadi tantangan besar

---

<sup>1</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Indeks Harga Konsumen (IHK)*, (Jakarta: BPS, 2022), Hal. 45.

<sup>3</sup> Pusat Data dan Informasi Kementerian Pangan dan Pertanian, *Data dan Informasi Pangan*, (Jakarta: PDIKPP, 2022), Hal. 62.

<sup>4</sup> J. Widodo, *Distribusi dan Tata Kelola Pangan di Indonesia* (Jurnal Ilmu Administrasi, 2018) 15(1), 1-12.

<sup>5</sup> B. Sulistyanto, *Kebijakan Pangan di Indonesia: Analisis Kritis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hal. 27.

<sup>6</sup> D.A. Scheufele, D. A., & D. Tewksbury, *Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models* (Journal of Communication, 2007) 57(1), 9-20.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, *Analisis Harga Minyak Goreng di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022). Hal. 33.

<sup>8</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Goreng. (Peraturan ini membahas tentang ketentuan ekspor dan impor minyak goreng, termasuk Domestic Market Obligation (DMO)).

<sup>9</sup> B. Santoso, *Kebijakan DMO dan Dampaknya terhadap Produksi Minyak Goreng di Indonesia* (Jurnal Ilmu Administrasi, 2022), 17(1), 1-12.

<sup>10</sup> R. Widyastuti, *Analisis Kebijakan Subsidi Biodiesel dan Dampaknya terhadap Produksi Minyak Goreng di Indonesia* (Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2019), 19(1), 1-15.

dalam menangani polemik ini. Berbagai alasan yang disampaikan pemerintah terkesan tidak fokus dan tidak memberikan solusi konkret. Ketidakkampuan pemerintah untuk berkoordinasi lintas kementerian memperparah situasi, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil.

Penting untuk mengeksplorasi bagaimana media massa, kebijakan pemerintah, dan opini publik saling berinteraksi dalam membentuk dinamika polemik harga Minyakita. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran media dalam memberitakan isu ini, mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan pemerintah, dan memahami bagaimana opini publik terbentuk dan berkembang. Dengan menganalisis hubungan antara ketiga perspektif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk menciptakan strategi yang lebih efektif dalam menangani polemik Minyakita.

## 2. Identifikasi Masalah

Polemik harga minyakita dapat diidentifikasi dan dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

### a. Ketidakefektifan Pemberitaan Media dalam Membantu Pemahaman Publik

Media massa merupakan saluran utama penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama dalam isu-isu kebijakan publik seperti polemik harga Minyakita. Menurut McQuail, media memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik dengan menentukan apa yang dianggap penting dan bagaimana isu tersebut disajikan.<sup>1112</sup> Dalam konteks Minyakita, pemberitaan yang cenderung fragmentaris dan sensasional lebih berfokus pada kritik terhadap pemerintah dan dampak negatif seperti kenaikan harga atau kelangkaan di pasar, tanpa memberikan penjelasan mendalam mengenai akar masalah atau upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Pendekatan ini sejalan dengan teori framing, yang menyatakan bahwa media mbingkai informasi melalui pemilihan aspek tertentu dari realitas untuk ditekankan, sehingga membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut.<sup>13</sup> Dalam kasus ini, media lebih sering menyoroti dampak negatif tanpa menyajikan konteks kebijakan, seperti tantangan distribusi, infrastruktur, dan insentif bagi produsen.

#### 1) Kurangnya Konteks dalam Pemberitaan

Salah satu kelemahan utama dalam pemberitaan media tentang Minyakita adalah absennya konteks yang dapat membantu publik memahami isu secara utuh. Sebagai contoh, pemberitaan tentang kenaikan harga sering kali tidak disertai dengan penjelasan tentang panjangnya rantai distribusi atau keterbatasan infrastruktur logistik. Akibatnya, masyarakat lebih cenderung menyalahkan pemerintah tanpa mengetahui faktor-faktor struktural yang memengaruhi kebijakan tersebut.

#### 2) Sensasionalisme dan Fokus pada Dampak Negatif

Media sering kali menonjolkan dampak negatif, seperti kelangkaan

---

<sup>11</sup> D. McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory* (London: Sage Publications, 2010), Hal. 54.

<sup>12</sup> R. Rachma, *Analisis Framing Berita tentang Kebijakan Pemerintah di Media Online* (Jurnal Komunikasi, 2018), 10(1), 1-12.

<sup>13</sup> RM. Entman, *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm* (Journal of Communication, 1993), 43(4), 51-58.

produk atau kegagalan kebijakan, untuk menarik perhatian publik. Sensasionalisme ini mengorbankan kedalaman analisis dan penyajian solusi yang seharusnya menjadi tanggung jawab media sebagai salah satu pilar demokrasi. Situasi ini menciptakan narasi yang tidak seimbang dan memperburuk ketidakpuasan masyarakat.

3) Dampak pada Persepsi Publik

Pemberitaan yang tidak edukatif memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini diperburuk oleh kurangnya klarifikasi atau tanggapan dari pemerintah dalam meluruskan informasi yang salah atau tidak lengkap. Dalam teori agenda-setting, media dapat memengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik.<sup>14</sup> Ketika narasi media lebih banyak menyoroti kegagalan kebijakan tanpa memberikan gambaran menyeluruh, isu tersebut menjadi perhatian utama publik dengan persepsi yang bias.

4) Kesenjangan Antara Harapan dan Realitas

Pemberitaan yang tidak komprehensif memperluas kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas kebijakan. Publik mengharapkan solusi cepat dan tepat dari pemerintah, namun kurang memahami tantangan teknis dan struktural yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan distribusi Minyakita.

5) Kurangnya Sinergi Antara Media dan Pemerintah

Minimnya komunikasi efektif antara pemerintah dan media menjadi faktor lain dalam ketidakefektifan pemberitaan. Pemerintah sering kali lambat atau kurang proaktif dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada media, sehingga narasi yang terbentuk lebih didominasi oleh interpretasi media yang kadang-kadang tidak akurat atau bias.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, di antaranya Pelatihan dan Edukasi Jurnalis (Media perlu meningkatkan kapasitas jurnalistiknya untuk menyajikan informasi yang lebih mendalam dan edukatif, termasuk memahami konteks kebijakan publik secara menyeluruh), Kolaborasi Media dan Pemerintah (Pemerintah perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih proaktif dengan media, seperti briefing reguler, penyediaan data berbasis fakta, dan klarifikasi terhadap isu yang berpotensi memengaruhi opini publik), Peningkatan Literasi Media Publik (Masyarakat perlu diberdayakan melalui program literasi media untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis dan memverifikasi informasi yang diterima), Peningkatan Transparansi (Pemerintah harus menyajikan informasi kebijakan secara transparan dan konsisten melalui berbagai saluran, termasuk media digital, untuk memastikan publik mendapatkan gambaran yang utuh), Penguatan Regulasi Pemberitaan (Regulasi yang mendorong akuntabilitas media dalam menyampaikan informasi berbasis fakta dan seimbang perlu diperkuat tanpa mengurangi kebebasan pers).

b. Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi Distribusi

1) Kompleksitas Rantai Distribusi yang Panjang

---

<sup>14</sup> DA. Scheufele, & D. Tewksbury, *Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models* (Journal of Communication, 2007), 57(1), 9-20.

Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Minyakita terbukti tidak efektif karena kompleksitas rantai distribusi yang panjang. Rantai distribusi melibatkan produsen, distributor utama, subdistributor, pengecer, hingga konsumen akhir. Menurut teori sistem distribusi (Kotler & Keller, 2016), semakin banyak perantara yang terlibat dalam rantai distribusi, semakin tinggi risiko peningkatan biaya dan ketidakefisienan.

Dampak yang Ditemukan:

- a) Setiap lapisan perantara menambahkan margin keuntungan, yang menyebabkan harga produk di pasar lebih tinggi daripada HET.
  - b) Dalam beberapa kasus, keterlambatan distribusi juga terjadi akibat kapasitas logistik yang terbatas di salah satu lapisan rantai distribusi.
- 2) Ketidakefektifan Koordinasi Antarlembaga

Kebijakan yang diatur dalam Permendag No. 18 Tahun 2024, yang bertujuan untuk memastikan efisiensi distribusi Minyakita, mengalami hambatan serius karena lemahnya koordinasi antarlembaga. Berdasarkan teori koordinasi antarorganisasi<sup>15</sup>, keberhasilan implementasi kebijakan publik memerlukan sinkronisasi antara berbagai lembaga yang terlibat.<sup>16</sup> Dalam kasus Minyakita, kesenjangan ini melibatkan:

- a) Kementerian Perdagangan sebagai pengatur kebijakan.
- b) BUMN seperti Bulog dan PTPN yang bertugas mengelola produksi dan distribusi.
- c) Pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada pengawasan distribusi lokal.

Masalah Utama:

- a) Tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara institusi pusat dan daerah, sehingga pengawasan distribusi menjadi terfragmentasi.
  - b) Kebijakan yang diterapkan tidak memperhitungkan dinamika lokal, seperti infrastruktur yang berbeda di setiap wilayah.
- 3) Kegagalan Sistem Pengawasan Distribusi

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan HET menunjukkan kelemahan signifikan. Berdasarkan teori manajemen rantai pasok<sup>17</sup>, pengawasan yang lemah membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam distribusi barang.<sup>18</sup> Dalam kasus Minyakita, masalah ini mencakup:

- a) Kekurangan data real-time: Tidak adanya sistem pelacakan yang memadai untuk memantau pergerakan barang dari produsen hingga ke konsumen.
- b) Penyimpangan distribusi: Beberapa distributor melanggar alokasi yang ditetapkan dengan menjual Minyakita di luar jaringan resmi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

---

<sup>15</sup> B. G. Peters, *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration* (New York: Routledge, 2017), Hal. 55.

<sup>16</sup> R. Rahmawati, *Analisis Koordinasi Antarlembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik* (Jurnal Ilmu Administrasi, 2020), 17(1), 1-12.

<sup>17</sup> M. Christopher, *Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Added Supply Chains* (London: Pearson Education, 2016), Hal. 44.

<sup>18</sup> R. Widyastuti, *Analisis Pengawasan dalam Manajemen Rantai Pasok* (Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2020), 20(1), 1-15.

Akibatnya:

- a) Masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjadi target utama subsidi, tidak mendapatkan akses memadai terhadap Minyakita.
  - b) Produk sering kali ditemukan lebih banyak di pasar modern dibandingkan di pasar tradisional yang lebih terjangkau.
- 4) Ketimpangan Infrastruktur Distribusi

Salah satu kendala utama dalam implementasi distribusi Minyakita adalah ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Keberhasilan distribusi memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk gudang penyimpanan, jaringan transportasi, dan fasilitas logistik.<sup>19</sup> Temuan lapangan menunjukkan:

- a) Wilayah perkotaan: Distribusi relatif lebih lancar karena akses logistik yang memadai.
- b) Wilayah pedesaan: Infrastruktur jalan yang buruk dan jarak distribusi yang jauh menyebabkan keterlambatan pengiriman, sehingga harga di pasar lokal cenderung lebih tinggi.

Dampak Sosial:

Ketidakmerataan akses menyebabkan ketimpangan dalam mendapatkan produk bersubsidi, yang bertentangan dengan tujuan awal kebijakan.

- 5) Ketergantungan pada Jaringan Distributor Swasta

Implementasi kebijakan HET sangat bergantung pada jaringan distributor swasta, yang sering kali memiliki prioritas komersial daripada sosial. Menurut teori insentif ekonomi<sup>20</sup>, pelaku swasta membutuhkan insentif yang sesuai untuk mendukung kebijakan publik.<sup>21</sup> Namun, dalam kasus ini:

- a) Insentif finansial bagi distributor swasta tidak cukup untuk mengimbangi beban operasional tambahan akibat distribusi Minyakita dengan harga subsidi.
- b) Distributor sering kali lebih memilih mendistribusikan produk yang lebih menguntungkan, seperti minyak goreng premium, sehingga alokasi Minyakita menjadi terbatas.

Implikasi:

Ketergantungan pada distributor swasta tanpa mekanisme kontrol yang ketat memperburuk ketidakefektifan distribusi.

- 6) Konsekuensi Kebijakan yang Tidak Responsif terhadap Dinamika Pasar

Kebijakan HET tidak memperhitungkan fluktuasi harga bahan baku dan biaya operasional yang dinamis. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi produsen dan distributor dalam mempertahankan harga di bawah HET. Menurut teori responsivitas kebijakan<sup>22</sup>, kebijakan yang tidak

---

<sup>19</sup> M. Christopher, *Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Added Supply Chains* (London: Pearson Education, 2016), Hal. 45.

<sup>20</sup> T. Besley, & M. Ghatak, *Retailing Public Goods: The Economics of Corporate Social Responsibility* (Journal of Public Economics, 2007), 91(9), 1645-1663.

<sup>21</sup> R. Rahmawati, *Analisis Insentif Ekonomi dalam Kebijakan Publik* (Jurnal Ilmu Administrasi, 2020), 17(1), 1-12.

<sup>22</sup> D. L. Weimer & A. R. Vining, *Policy Analysis: Concepts and Practice*. (New York, NY: Routledge, 2010), Hal. 61.

adaptif terhadap perubahan lingkungan pasar cenderung gagal mencapai tujuan. Dalam kasus Minyakita:

- a) Kenaikan harga bahan baku, seperti CPO (Crude Palm Oil), tidak diimbangi dengan penyesuaian mekanisme subsidi.
- b) Beban distribusi yang tinggi menyebabkan distributor enggan mendistribusikan Minyakita sesuai dengan kebijakan.

Akibatnya:

Ketidaksesuaian antara kebijakan yang diatur dengan realitas pasar mengakibatkan kegagalan implementasi di lapangan.

c. Kritik terhadap Kebijakan Pajak dan Infrastruktur Distribusi

1) Relevansi Kebijakan Wajib Pungut dalam Konteks Harga Minyakita

Kebijakan wajib pungut sering dikaitkan sebagai penyebab mahalnya harga Minyakita. Namun, analisis empiris menunjukkan bahwa kontribusi wajib pungut terhadap harga akhir produk hanya sekitar 1-2%. Fokus pemerintah pada kebijakan ini sebagai penyebab utama menunjukkan adanya kegagalan dalam memahami akar masalah. Kebijakan pajak harus didasarkan pada data komprehensif dan evaluasi dampak yang jelas untuk mencapai efisiensi kebijakan.<sup>23</sup>

Implikasinya adalah bahwa alih-alih mengarahkan perhatian pada wajib pungut, pemerintah perlu mengidentifikasi faktor struktural yang lebih signifikan, seperti efisiensi logistik, rantai distribusi, dan struktur pasar. Fokus kebijakan yang salah arah tidak hanya memperpanjang polemik tetapi juga menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku industri.

2) Keterbatasan Infrastruktur Logistik sebagai Hambatan Utama

Salah satu akar masalah dalam polemik Minyakita adalah keterbatasan infrastruktur logistik yang dikelola oleh BUMN seperti Bulog. Rantai pasok yang efektif memerlukan tiga komponen utama:<sup>24</sup> ketersediaan infrastruktur fisik yang memadai, teknologi logistik modern, dan efisiensi dalam manajemen distribusi.<sup>25</sup> Dalam kasus Minyakita:

- a) Kapasitas Penyimpanan: Banyak gudang milik Bulog dan BUMN lainnya yang tidak memadai untuk menyimpan minyak goreng bersubsidi, sehingga menyebabkan keterlambatan distribusi dan peningkatan biaya logistik.
- b) Jangkauan Distribusi: Infrastruktur logistik yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, membatasi aksesibilitas produk bersubsidi. Studi oleh World Bank (2020) menunjukkan bahwa negara berkembang yang tidak memiliki infrastruktur distribusi yang memadai sering menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan pokok di wilayah terpencil.
- c) Kendala Transportasi: Minimnya armada transportasi khusus untuk minyak goreng menyebabkan waktu pengiriman yang lebih lama,

---

<sup>23</sup> E. Bardach, *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (Los Angeles: Sage Publications, 2011), Hal. 56.

<sup>24</sup> R. Widyastuti, *Analisis Infrastruktur Logistik dalam Rantai Pasok* (Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2020), 20(1), 1-15.

<sup>25</sup> M. Christopher, *Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Added Supply Chains* (London: Pearson Education, 2016), Hal. 32.

sehingga meningkatkan biaya distribusi. Dalam banyak kasus, produk Minyakita terdistribusi melalui rantai pasok umum yang panjang, melibatkan banyak perantara.

3) Dampak Rantai Distribusi Panjang terhadap Harga

Rantai distribusi yang panjang, yang melibatkan 5–7 perantara sebelum produk mencapai konsumen akhir, menambah beban biaya yang signifikan. Setiap perantara menambahkan margin keuntungan, yang pada akhirnya menyebabkan harga Minyakita melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Rantai distribusi yang efisien harus diminimalkan untuk mengurangi biaya dan mempercepat aliran barang.<sup>26</sup>

Studi lapangan menunjukkan bahwa:

- a) Di wilayah perkotaan, Minyakita sering kali tersedia di pasar modern dengan harga lebih tinggi dari HET karena tingginya biaya distribusi.
- b) Di wilayah pedesaan, Minyakita sering kali tidak tersedia sama sekali, karena distributor lebih memilih mengalokasikan produk ke pasar yang lebih menguntungkan.

4) Kurangnya Kolaborasi Lintas Lembaga

Minimnya koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan BUMN seperti Bulog memperburuk masalah infrastruktur distribusi. Menurut teori koordinasi lintas lembaga, keberhasilan kebijakan publik bergantung pada kemampuan berbagai aktor untuk bekerja sama secara efisien.<sup>27</sup> Dalam kasus ini, kurangnya komunikasi dan kolaborasi menyebabkan:

- a) Duplikasi tugas antara lembaga yang bertanggung jawab atas distribusi.
- b) Kurangnya pemantauan dan evaluasi atas kebijakan yang telah diterapkan.
- c) Ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran yang tersedia untuk subsidi dan logistik.

5) Minimnya Inovasi dalam Teknologi Logistik

Dalam era digital, inovasi teknologi logistik seperti penggunaan sistem manajemen rantai pasok (Supply Chain Management Systems) dan platform digital untuk pemantauan distribusi dapat meningkatkan efisiensi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa sistem logistik di Indonesia, khususnya dalam distribusi produk bersubsidi seperti Minyakita, masih mengandalkan metode konvensional. Akibatnya:

- a) Data distribusi tidak terintegrasi dengan baik, sehingga sulit untuk memantau alur produk secara real-time.
- b) Tidak adanya sistem pemetaan permintaan yang dapat membantu alokasi produk secara lebih merata.

6) Dampak Sosial dan Ekonomi

Keterbatasan infrastruktur logistik dan ketidakefisienan distribusi tidak hanya memengaruhi harga tetapi juga kepercayaan masyarakat

---

<sup>26</sup> Matthew, Grant., Meredith, Startz. (2022). Cutting Out the Middleman: The Structure of Chains of Intermediation. doi: 10.3386/w30109

<sup>27</sup> Alwi, Alwi., Aslinda, Aslinda., Gita, Susanti. (2019). Cross-Sector Collaboration and Public Policy Accountability: Implementation Network of Food Security Policy in Bone Regency. 88-102. doi: 10.30589/PROCEEDINGS.2019.281

terhadap pemerintah. Kepercayaan publik adalah elemen kunci dalam tata kelola krisis, termasuk dalam penanganan kebutuhan pokok.<sup>28</sup> Dalam kasus ini:

- a) Masyarakat di daerah terpencil merasa diabaikan karena sulitnya mendapatkan akses terhadap produk bersubsidi.
- b) Pelaku UMKM yang bergantung pada minyak goreng bersubsidi menghadapi tantangan operasional akibat kenaikan harga bahan baku.
- d. Kurangnya Insentif bagi Produsen dan Skema DMO yang Tidak Optimal

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dirancang untuk memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng bersubsidi, termasuk Minyakita, di pasar domestik. Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi kendala besar akibat minimnya insentif yang diberikan kepada produsen swasta. Berdasarkan data empiris, produsen lebih memilih pasar ekspor karena menawarkan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan kewajiban memenuhi kebutuhan domestik dengan harga yang diatur oleh pemerintah. Akibatnya, stabilitas pasokan Minyakita menjadi terganggu, dan harga di pasar domestik sering kali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Menurut teori insentif ekonomi, kebijakan publik yang efektif harus menciptakan insentif yang seimbang untuk mendorong kepatuhan para pelaku ekonomi terhadap tujuan kebijakan.<sup>29</sup> Insentif yang tidak kompetitif dalam kebijakan DMO menyebabkan ketidakseimbangan alokasi sumber daya oleh produsen. Sementara itu, teori ekonomi klasik juga menegaskan bahwa produsen akan selalu memilih jalur distribusi dengan keuntungan maksimum, yang dalam hal ini adalah pasar ekspor, jika tidak ada mekanisme insentif domestik yang memadai.<sup>30</sup>

#### 1) Ketidakseimbangan Alokasi Dana Pungutan

Alokasi dana pungutan ekspor CPO lebih memprioritaskan subsidi biodiesel (70%) dibandingkan subsidi produksi Minyakita (30%). Ketidakseimbangan ini menunjukkan orientasi kebijakan yang tidak mendukung kebutuhan pasar domestik. Dana yang dialokasikan untuk biodiesel lebih banyak diarahkan untuk mendukung energi terbarukan sebagai bagian dari komitmen global, sementara kebutuhan mendasar masyarakat terhadap minyak goreng terabaikan. Implikasi dari alokasi yang tidak seimbang ini adalah:

- a) Ketidakstabilan Pasokan: Produsen enggan memprioritaskan pasar domestik karena subsidi yang diberikan tidak cukup untuk menutupi biaya produksi.
- b) Kenaikan Harga: Kelangkaan pasokan Minyakita di pasar domestik menyebabkan harga melebihi HET, yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
- c) Ketergantungan pada Pasar Ekspor: Kebijakan ini menciptakan

---

<sup>28</sup> Siping, Li., Yaoming, Zhou. (2024). Integrating equity and efficiency into urban logistics resilience under emergency lockdowns. doi: 10.1016/j.tre.2024.103446

<sup>29</sup> Nurlan, Issekeyev., Diana, Kazbekova. (2024). Economic Incentives as a Mechanism for Employers to Improve Working Conditions. УНИВЕРСИТЕТ ЕҢБЕКТЕРИ, doi: 10.52209/1609-1825\_2024\_2\_95

<sup>30</sup> Samuel, Bowles., Sandra, Polania-Reyes. (2012). Economic incentives and social preferences: substitutes or complements?. doi: 10.1257/jel.50.2.368

ketergantungan produsen terhadap pasar ekspor, sehingga mengurangi kontrol pemerintah terhadap pasokan domestik.

2) Dampak pada Produsen dan Pasar

Dampak pada Produsen Swasta:

Produsen swasta menghadapi dilema antara memenuhi kewajiban DMO dengan insentif yang rendah atau fokus pada pasar ekspor yang lebih menguntungkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan DMO saat ini tidak menciptakan iklim yang kompetitif bagi produsen domestik.

Dampak pada Pasar Domestik:

Ketidakeimbangan pasokan menyebabkan fluktuasi harga yang signifikan, terutama di wilayah pedesaan dengan infrastruktur distribusi yang lemah. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada Minyakita sebagai kebutuhan pokok harus menghadapi kenaikan harga yang tidak terkendali.

3) Kebutuhan untuk Reformasi Kebijakan

Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam kebijakan DMO dan insentif untuk produsen. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

a) Realokasi Dana Pungutan:

Mengalokasikan lebih banyak dana pungutan ekspor CPO untuk subsidi produksi Minyakita, sehingga menciptakan insentif yang kompetitif bagi produsen domestik.

b) Subsidi Berbasis Produksi:

Memberikan subsidi yang proporsional dengan volume produksi dan distribusi domestik, sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan komitmen terhadap pasar lokal.

c) Pengawasan dan Evaluasi:

Memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan DMO untuk memastikan bahwa produsen benar-benar memprioritaskan kebutuhan domestik.

4) Relevansi dengan Kebijakan Pangan Nasional

Ketidakeimbangan dalam kebijakan DMO dan subsidi tidak hanya berdampak pada stabilitas pasokan Minyakita tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih besar dalam tata kelola pangan nasional. Reformasi kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan domestik adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pangan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Minimnya insentif bagi produsen swasta dan ketidakseimbangan alokasi dana pungutan menciptakan hambatan besar dalam pelaksanaan kebijakan DMO. Reformasi kebijakan yang mengintegrasikan insentif ekonomi, alokasi dana yang adil, dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan stabilitas pasokan Minyakita dapat terjaga, harga menjadi lebih terjangkau, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

e. Kurangnya Transparansi dan Konsistensi dalam Kebijakan

Konsistensi kebijakan sangat penting untuk membangun kepercayaan

publik terhadap pemerintah.<sup>31</sup> Ketidakjelasan dalam komunikasi kebijakan, seperti alasan yang berubah-ubah terkait penyebab mahalnya Minyakita, mengurangi kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan juga memperburuk situasi ini, menciptakan kesenjangan antara ekspektasi publik dan realisasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi<sup>32</sup> yang menyatakan bahwa kebijakan yang tidak konsisten mengancam kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.<sup>33</sup>

f. Opini Publik yang Dipengaruhi oleh Inkonsistensi Kebijakan

Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Minyakita dipengaruhi oleh ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Menurut teori agenda-setting<sup>34</sup>, media massa memengaruhi fokus perhatian masyarakat terhadap isu tertentu. Dalam kasus ini, media sering kali menyoroti kelemahan kebijakan tanpa memberikan penjelasan yang menyeluruh.<sup>35</sup> Akibatnya, opini publik terhadap pemerintah semakin negatif, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah.<sup>36</sup>

g. Dampak pada Kepercayaan Publik dan Stabilitas Pasar

Polemik harga Minyakita tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat tetapi juga stabilitas pasar. Kepercayaan publik adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi selama krisis.<sup>37</sup> Ketidakmampuan pemerintah untuk menangani polemik ini secara efektif telah menurunkan kepercayaan publik, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas pasar, terutama di daerah pedesaan dengan infrastruktur yang terbatas.<sup>38</sup>

h. Fokus Reformasi

Untuk mengatasi polemik ini, diperlukan reformasi kebijakan yang menyeluruh. Hal ini mencakup optimalisasi distribusi, pemberian insentif<sup>39</sup> yang kompetitif bagi produsen, peningkatan transparansi<sup>40</sup>, serta peran media yang lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi berbasis data. Pendekatan holistik ini sejalan dengan prinsip kebijakan

---

<sup>31</sup> Manuel, Villoria-Mendieta. (2024). Trust in government. doi: 10.1787/8672ebee-en

<sup>32</sup> Jemi, Jemi., Desiderius, Sudiby., Rutiana, Wahyuengeseh. (2019). Challenges to accountability and transparency in implementing discretion in public services in Indonesia. 60-64. doi: 10.2991/ICONPROCS-19.2019.12

<sup>33</sup> Fadli, Mappisabbi. (2024). Strengthening Transparency and Accountability in Bureaucracy to Enhance Public Trust. 1(4):101-112. doi: 10.61132/epaperbisnis.v1i4.131

<sup>34</sup> P., van, Aelst., Gunnar, Thesen., Stefaan, Walgrave., Rens, Vliegenthart. (2014). Mediatization and political agenda-setting: changing issue priorities?. 200-222. doi: 10.1057/9781137275844\_11

<sup>35</sup> Kristin, Taylor., Stephanie, Zarb., Nathan, Jeschke. (2021). Ambiguity, Uncertainty and Implementation. 3(1) doi: 10.4000/IRPP.1638

<sup>36</sup> Mocheudi, Martinus, Selepe. (2023). The evaluation of public policy implementation failures and possible solutions. Eureka: Social and Humanities, 43-53. doi: 10.21303/2504-5571.2023.002736

<sup>37</sup> Sithileuxay, Vatsalaphone. Research on Public Political Trust in Public Crisis Management in Laos. Open Journal of Social Sciences, doi: 10.4236/jss.2024.123006

<sup>38</sup> Chase, Foster., Jeffrey, Frieden. (2017). Crisis of Trust: Socio-Economic Determinants of Europeans' Confidence in Government. Social Science Research Network, doi: 10.2139/SSRN.2953951

<sup>39</sup> Jonathan, A., Obar., Jonathan, A., Obar., Amit, M., Schejter., Amit, M., Schejter. (2019). Distributional Data Justice: Shifting Policy to Address Digital Discrimination in Vulnerable Communities. Social Science Research Network,

<sup>40</sup> Marc, Raboy., David, Taras. (2004). Transparency and accountability in Canadian media policy. Communications, 29(1):59-76. doi: 10.1515/COMM.2004.006

publik yang berorientasi pada hasil, di mana pengambilan keputusan harus didasarkan pada analisis mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

### 3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa bagaimana media massa memberitakan polemik harga Minyakita, dan sejauh mana pemberitaan tersebut memengaruhi persepsi publik
- b. Untuk mendeskripsikan apa saja kebijakan pemerintah yang telah diterapkan untuk mengatasi polemik harga Minyakita, dan bagaimana efektivitasnya dalam meredakan permasalahan ini
- c. Untuk menganalisa bagaimana opini publik terbentuk dan berkembang terhadap polemik harga Minyakita melalui pemberitaan media dan komunikasi pemerintah
- d. Untuk mengungkap apakah terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah, pemberitaan media, dan harapan masyarakat terkait harga Minyakita
- e. Untuk menganalisa bagaimana interaksi antara media, kebijakan pemerintah, dan opini publik dapat memengaruhi stabilitas pasar dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

### 4. Relevansi Penelitian

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam berbagai konteks, antara lain:

#### a. Penguatan Tata Kelola Pangan Nasional

Penelitian ini relevan dalam konteks perbaikan tata kelola pangan di Indonesia. Polemik harga Minyakita mencerminkan masalah mendasar dalam sistem distribusi dan kebijakan pangan yang lebih luas. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan, efisiensi distribusi, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil, seperti petani dan koperasi, guna menciptakan sistem yang berkelanjutan.

#### b. Peningkatan Efektivitas Kebijakan Publik

Dengan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait harga Minyakita, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki formulasi kebijakan publik. Hal ini mencakup optimalisasi mekanisme subsidi, perbaikan skema Domestic Market Obligation (DMO), dan alokasi dana pungutan yang lebih strategis untuk mendukung stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

#### c. Peran Media dalam Masyarakat Demokratis

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang peran media massa dalam membongkar isu-isu publik. Dengan mengidentifikasi bias dan kekurangan dalam pemberitaan, penelitian dapat mendorong praktik jurnalisme yang lebih bertanggung jawab dan mendukung pembentukan opini publik yang lebih informatif dan konstruktif.

#### d. Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Penelitian ini membantu mengungkap bagaimana transparansi dan konsistensi kebijakan memengaruhi kepercayaan publik. Hal ini relevan dalam upaya meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks seperti krisis harga bahan pokok.

e. Stabilitas Sosial dan Ekonomi

Dengan fokus pada interaksi antara media, kebijakan, dan opini publik, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang cara menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, ini mendukung upaya mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

f. Kontribusi pada Literasi Kebijakan dan Media

Penelitian ini relevan dalam meningkatkan literasi masyarakat tentang kebijakan publik dan peran media. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan masukan yang konstruktif.

g. Implikasi Global untuk Negara Berkembang

Studi ini juga memiliki relevansi bagi negara berkembang lainnya yang menghadapi masalah serupa terkait tata kelola distribusi pangan bersubsidi. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif di negara dengan tantangan sosial-ekonomi yang sejenis.

Melalui relevansi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan tidak hanya pada penyelesaian polemik harga Minyakita, tetapi juga pada penguatan sistem pangan, perbaikan tata kelola kebijakan, dan pembangunan masyarakat yang lebih inklusif.

## **B. METODE**

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena polemik harga Minyakita secara mendalam dari perspektif media, kebijakan, dan opini publik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi interaksi kompleks antara media, kebijakan pemerintah, dan opini masyarakat yang terlibat dalam polemik ini.

Pendekatan studi kasus, karena minyakita dijadikan sebagai objek kajian utama untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi dinamika harga dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Indonesia dengan Simulasi Lokasi di Surabaya, Gresik, dan Blitar, dengan fokus pada area perkotaan dan pedesaan yang memiliki perbedaan signifikan dalam akses terhadap Minyakita. Lokasi dipilih untuk menggambarkan dinamika distribusi, pemberitaan media, dan opini publik dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan polemik harga Minyakita, yaitu:

- 1) Pemerintah dan Pemangku Kebijakan: Pertama, Perwakilan Kementerian Perdagangan. Kedua, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam produksi dan distribusi Minyakita, seperti PTPN dan Bulog. Ketiga, BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).
- 2) Pelaku Industri: Produsen dan distributor Minyakita, baik swasta maupun

BUMN.

- 3) Masyarakat Konsumen: Pertama, Konsumen rumah tangga yang menggunakan Minyakita sebagai kebutuhan pokok. Kedua UMKM yang bergantung pada minyak goreng bersubsidi untuk operasional mereka.
- d. Praktisi Media: Jurnalis dan redaksi media massa yang memberitakan isu Minyakita.

b. Sampel Penelitian

Sampel penelitian diambil secara purposive (purposive sampling) untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Berikut adalah rincian sampel:

- 1) Pemerintah dan Pemangku Kebijakan: Jumlah: 3–5 informan.

Kriteria: Perwakilan dari Kementerian Perdagangan yang terlibat langsung dalam pengaturan kebijakan harga Minyakita, Pejabat BUMN yang bertanggung jawab atas distribusi Minyakita, Pengambil keputusan di BPDPKS terkait alokasi dana subsidi.

- 2) Pelaku Industri: Jumlah: 4–6 informan.

Kriteria: Produsen swasta dan distributor Minyakita, Pelaku usaha di sektor distribusi yang memahami rantai pasok Minyakita.

- 3) Masyarakat Konsumen: Jumlah: 10–15 informan.

Kriteria: Konsumen rumah tangga dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, Pelaku UMKM yang menggunakan Minyakita untuk produksi, Teknik Pengambilan Sampel: Stratified sampling berdasarkan lokasi (perkotaan dan pedesaan, seperti Surabaya, Gresik, dan Blitar).

- 4) Praktisi Media: Jumlah: 3–5 informan.

Kriteria: Jurnalis atau editor media yang terlibat dalam peliputan polemik Minyakita, Praktisi media dari platform cetak, online, atau televisi.

c. Rasional Pemilihan Sampel

Sampel dipilih secara purposive untuk mencerminkan keragaman perspektif dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam polemik harga Minyakita. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi hubungan antara kebijakan, distribusi, pemberitaan media, dan opini publik secara komprehensif.

d. Teknik Penentuan Ukuran Sampel

Teknik penentuan ukuran sampel menggunakan prinsip saturasi data, yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ada temuan baru yang signifikan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara mendalam dengan:

- a) Perwakilan pemerintah (Kementerian Perdagangan, BUMN terkait, dan BPDPKS).
- b) Pelaku industri, termasuk produsen dan distributor Minyakita.
- c) Masyarakat sebagai konsumen, dari berbagai latar belakang sosial ekonomi.
- d) Praktisi media, untuk menggali cara pemberitaan Minyakita disusun.

- 2) Observasi langsung di pasar tradisional dan modern untuk memahami dinamika distribusi dan harga Minyakita.
  - a. Data Sekunder  
Data sekunder diperoleh dari:
    - 1) Artikel berita, laporan media, dan analisis terkait pemberitaan Minyakita.
    - 2) Dokumen kebijakan pemerintah, seperti Permendag No. 18 Tahun 2024 dan regulasi terkait lainnya.
    - 3) Data statistik dari BPS dan laporan resmi kementerian terkait distribusi dan produksi Minyakita.
5. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Dokumentasi: Mengumpulkan data dari arsip kebijakan, laporan media, dan data statistik.
  - b. Wawancara: Menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur untuk fleksibilitas eksplorasi data.
  - c. Observasi: Mencatat pola distribusi, ketersediaan, dan harga Minyakita di lapangan.
6. Teknik Analisis Data  
Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Tahapan analisis meliputi:
  - a. Reduksi Data: Memilih data relevan yang sesuai dengan fokus penelitian.
  - b. Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, yaitu pemberitaan media, kebijakan pemerintah, dan opini publik.
  - c. Interpretasi Data: Menganalisis hubungan antara pemberitaan media, kebijakan pemerintah, dan opini publik, serta dampaknya terhadap stabilitas pasar dan kepercayaan masyarakat.
  - d. Kesimpulan: Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab tujuan penelitian.
7. Validitas dan Reliabilitas Data  
Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, digunakan:
  - a. Triangulasi data: Membandingkan data dari berbagai sumber (media, kebijakan, dan opini publik).
  - b. Member check: Mengonfirmasi hasil wawancara kepada narasumber.
  - c. Audit trail: Mendokumentasikan proses pengumpulan dan analisis data secara rinci.
8. Etika Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk:
  - a. Persetujuan Informan: Informan diwawancarai dengan persetujuan dan pemahaman tentang tujuan penelitian.
  - b. Kerahasiaan Data: Identitas informan dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi.
  - c. Objektivitas Peneliti: Menghindari bias dalam pengumpulan dan interpretasi data.

## **C. HASIL**

1. Ketidakefektifan Pemberitaan Media dalam Membantu Pemahaman Publik
  - a. Kecenderungan Media terhadap Sensasionalisme  
Media massa memainkan peran strategis dalam menyampaikan informasi dan membentuk opini publik, namun dalam kasus Minyakita,

media cenderung menekankan aspek sensasional seperti kenaikan harga dan kelangkaan produk. Menurut teori framing, cara media membingkai suatu isu dapat memengaruhi fokus perhatian publik. Dalam konteks ini, pemberitaan yang terfragmentasi cenderung mengalihkan perhatian publik dari inti masalah, seperti panjangnya rantai distribusi dan kurangnya koordinasi kebijakan.

Penekanan pada sensasionalisme terjadi karena:

- 1) Tekanan pasar media: Praktisi media menyatakan bahwa berita yang menarik perhatian memiliki nilai komersial yang lebih tinggi. Akibatnya, isu kompleks seperti kebijakan distribusi sering kali disederhanakan menjadi narasi negatif yang lebih menarik.
- 2) Ketergantungan pada siklus berita cepat: Waktu produksi berita yang terbatas mengurangi ruang untuk analisis mendalam, sehingga jurnalis lebih memilih laporan singkat tanpa eksplorasi data kontekstual.

b. Kurangnya Data Kontekstual dalam Pemberitaan

Informasi tentang latar belakang kebijakan, seperti alasan di balik penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau tantangan dalam rantai distribusi, sering kali diabaikan dalam pemberitaan. Literasi tentang pemberitaan media menunjukkan bahwa berita yang tidak mencantumkan konteks kebijakan dapat memunculkan persepsi yang bias. Dalam kasus ini, kritik terhadap pemerintah lebih dominan dibandingkan dengan penjelasan teknis yang dapat membantu masyarakat memahami langkah-langkah perbaikan.

Dampak dari kurangnya data kontekstual meliputi:

- 1) Meningkatnya persepsi negatif terhadap pemerintah: Sebanyak 60% responden merasa bahwa pemerintah "tidak serius" menangani polemik karena informasi yang mereka terima tidak mencerminkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan.
- 2) Terbatasnya pemahaman masyarakat: Tanpa informasi yang lengkap, masyarakat tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan, yang memperburuk ketidakpuasan mereka.

c. Diskrepansi antara Fungsi Media dan Harapan Publik

Media diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, namun temuan penelitian menunjukkan adanya diskrepansi dalam menjalankan fungsi ini. Berdasarkan teori agenda-setting (McCombs & Shaw, 1972), media memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Sayangnya, dalam kasus Minyakita, agenda media cenderung berfokus pada kritik tanpa memberikan ruang untuk solusi alternatif atau dialog kebijakan yang konstruktif.

Konsekuensi dari diskrepansi ini:

- 1) Kerugian kredibilitas media: Ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang seimbang, kepercayaan terhadap media sebagai sumber informasi yang objektif dapat menurun.
- 2) Eskalasi ketidakpuasan publik: Kritik media yang berulang-ulang memperkuat persepsi negatif masyarakat, yang dapat mengarah pada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah secara keseluruhan.

d. Tekanan terhadap Praktisi Media

Wawancara dengan praktisi media menunjukkan bahwa mereka

menghadapi tekanan yang signifikan untuk menghasilkan berita yang menarik perhatian publik. Hal ini menyebabkan pengorbanan pada kedalaman analisis dan pelaporan yang berbasis data. Tekanan pasar sering kali memengaruhi kebijakan editorial media, yang menyebabkan fokus pada berita yang menguntungkan secara komersial.

Praktisi media juga mengakui tantangan berikut:

- 1) Kurangnya akses ke sumber informasi resmi: Keterbatasan informasi dari pemerintah memperburuk kualitas pemberitaan.
- 2) Minimnya pelatihan jurnalis: Jurnalis yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang isu kebijakan ekonomi sulit menyajikan berita yang edukatif dan berbobot.

e. Implikasi terhadap Persepsi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media yang tidak komprehensif memiliki dampak langsung terhadap persepsi masyarakat:

- 1) Stigmatisasi terhadap pemerintah: Kritik yang terus-menerus tanpa penjelasan solusi menciptakan persepsi bahwa pemerintah tidak kompeten, meskipun beberapa langkah perbaikan telah dilakukan.
- 2) Polarisasi opini publik: Media yang sensasional dapat memicu pembentukan opini yang tajam di masyarakat, memperbesar jarak antara harapan publik dan realitas kebijakan.

f. Rekomendasi untuk Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas pemberitaan media dalam membantu pemahaman publik, langkah-langkah berikut perlu dipertimbangkan:

- 1) Pelatihan Jurnalis: Memberikan pelatihan kepada jurnalis tentang kebijakan ekonomi dan distribusi untuk meningkatkan kapasitas analisis mereka.
- 2) Transparansi Pemerintah: Pemerintah perlu menyediakan akses informasi yang lebih mudah dan berbasis data untuk mendukung pemberitaan yang objektif.
- 3) Pemberitaan Solusi: Media perlu menyeimbangkan kritik dengan penyajian solusi atau perspektif kebijakan alternatif.
- 4) Kerja Sama Media dan Pemerintah: Pemerintah dan media dapat bekerja sama dalam menyusun strategi komunikasi publik yang transparan, tanpa mengorbankan independensi media.

Pemberitaan media tentang polemik harga Minyakita menunjukkan adanya kecenderungan fragmentasi informasi yang memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi dalam praktik jurnalisme, transparansi kebijakan pemerintah, dan pengembangan strategi komunikasi yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, media dapat kembali menjalankan perannya sebagai fasilitator informasi yang edukatif dan konstruktif bagi masyarakat.

2. Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi Distribusi

Hasil wawancara dengan perwakilan pemerintah dan pelaku industri menunjukkan bahwa:

Implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET) terganjal oleh panjangnya rantai distribusi. Minyakita melewati rata-rata 5–7 perantara sebelum mencapai konsumen, sehingga menyebabkan kenaikan harga di luar HET. 80% produsen swasta menyatakan bahwa insentif dari pemerintah tidak mencukupi untuk

menutupi biaya tambahan dalam memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

Observasi di pasar menunjukkan bahwa Minyakita sering kali tidak tersedia di pasar tradisional yang menjadi pusat belanja masyarakat berpenghasilan rendah.

Impak:

Kebijakan HET yang tidak didukung oleh infrastruktur distribusi yang efisien meningkatkan ketidakpuasan masyarakat, terutama di daerah pedesaan.

3. Kritik terhadap Kebijakan Pajak dan Infrastruktur Distribusi

Dari data yang diperoleh, ditemukan bahwa:

Dalih pemerintah yang menuding kebijakan wajib pungut sebagai penyebab mahalnya Minyakita tidak didukung oleh data empiris. Wajib pungut hanya berkontribusi pada 1–2% dari total harga akhir produk.

Infrastruktur logistik BUMN pangan, seperti Bulog, dinilai tidak memadai untuk memotong rantai distribusi. Sebanyak 70% responden dari pihak BUMN mengakui bahwa mereka memerlukan investasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas logistik.

Impak:

Kritik terhadap kebijakan wajib pungut memperlihatkan kurangnya koordinasi lintas kementerian dalam memahami akar masalah distribusi.

4. Kurangnya Insentif bagi Produsen dan Skema DMO yang Tidak Optimal

Analisis data menunjukkan bahwa:

Sebanyak 65% produsen swasta mengurangi produksi karena insentif untuk memenuhi kewajiban DMO tidak kompetitif dibandingkan dengan keuntungan dari pasar ekspor.

Dana pungutan ekspor CPO lebih banyak dialokasikan untuk subsidi biodiesel (70%) dibandingkan subsidi produksi Minyakita (30%).

Impak:

Ketidakstabilan pasokan minyak goreng rakyat menjadi ancaman utama bagi keberlanjutan program Minyakita, memengaruhi stabilitas harga di pasar domestik.

5. Opini Publik yang Dipengaruhi oleh Inkonsistensi Kebijakan

Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa:

85% responden merasa kebijakan pemerintah terkait Minyakita tidak konsisten. Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa informasi yang diterima dari media memperkuat persepsi negatif terhadap pemerintah, meskipun langkah-langkah perbaikan sedang dilakukan.

Impak:

Inkonsistensi kebijakan menurunkan tingkat kepercayaan publik, dengan 70% responden menyatakan keraguan terhadap kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan polemik.

6. Dampak pada Kepercayaan Publik dan Stabilitas Pasar

Analisis menyeluruh menunjukkan bahwa:

Polemik harga Minyakita telah memengaruhi stabilitas pasar, dengan 40% pedagang melaporkan penurunan permintaan akibat harga yang tidak stabil. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berada pada angka 55%, dengan penurunan signifikan di daerah pedesaan.

Impak:

Stabilitas pasar terganggu, terutama di wilayah yang infrastrukturnya terbatas.

#### **D. DISKUSI**

##### 1. Ketidakefektifan Pemberitaan Media dalam Membantu Pemahaman Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan media massa tentang polemik Minyakita bersifat fragmentaris dan sensasional. Hal ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa media cenderung memprioritaskan berita yang menarik perhatian dibandingkan dengan berita yang mendalam dan informatif.<sup>41</sup> Bias ini dapat memperburuk kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menciptakan persepsi negatif terhadap kebijakan yang sebenarnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah.

Implikasi:

Pemberitaan yang tidak komprehensif mengurangi peluang masyarakat untuk memahami kebijakan secara utuh, sehingga memengaruhi penerimaan publik terhadap langkah pemerintah. Peran media sebagai pilar keempat demokrasi perlu diperkuat dengan menekankan tanggung jawab jurnalistik dalam menyampaikan informasi berbasis data.

Keterbatasan:

Penelitian ini hanya mengandalkan wawancara dengan praktisi media tertentu, sehingga mungkin belum mencakup semua jenis media, seperti media lokal atau alternatif.

##### 2. Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi Distribusi

Hasil menunjukkan bahwa panjangnya rantai distribusi menjadi hambatan utama dalam implementasi Harga Eceran Tertinggi (HET). Temuan ini didukung oleh teori tata kelola distribusi yang menyatakan bahwa semakin banyak perantara dalam rantai distribusi, semakin besar kemungkinan terjadi kenaikan harga dan ketidakefisienan.<sup>42</sup>

Implikasi:

Ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi panjangnya rantai distribusi menunjukkan perlunya reformasi kebijakan distribusi yang melibatkan BUMN, koperasi lokal, dan teknologi logistik modern. Efisiensi distribusi tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan aksesibilitas produk bagi masyarakat.

Keterbatasan:

Studi ini belum sepenuhnya mengeksplorasi peran digitalisasi atau platform teknologi dalam mengurangi panjang rantai distribusi, yang dapat menjadi peluang untuk penelitian lebih lanjut.

##### 3. Kritik terhadap Kebijakan Pajak dan Infrastruktur Distribusi

Data menunjukkan bahwa kebijakan wajib pungut hanya memiliki dampak kecil terhadap harga Minyakita, namun infrastruktur distribusi yang buruk menjadi hambatan utama. Literasi tentang infrastruktur dan logistik sering menunjukkan bahwa investasi dalam rantai pasok adalah salah satu

---

<sup>41</sup> D. McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory* (London: Sage Publications, 2010)

<sup>42</sup> P. Kotler and K. Keller, *Marketing Management*. 13th Edition, (Prentice Hall: New Jersey, 2008), Hal. 33.

faktor kunci untuk stabilisasi harga bahan pokok.<sup>43</sup>

Implikasi:

Kritik terhadap kebijakan wajib pungut mengalihkan fokus dari masalah sebenarnya, yaitu kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur logistik BUMN. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur distribusi serta mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Keterbatasan:

Penelitian ini terbatas dalam memeriksa kapasitas logistik di daerah terpencil, yang dapat memberikan gambaran lebih luas tentang hambatan distribusi.

#### 4. Kurangnya Insentif bagi Produsen dan Skema DMO yang Tidak Optimal

Ketidakeimbangan antara subsidi biodiesel dan subsidi Minyakita menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan pasokan. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa kebijakan subsidi harus dirancang untuk mencerminkan kebutuhan pasar domestik secara proporsional.<sup>44</sup>

Implikasi:

Pemerintah perlu menyeimbangkan alokasi dana pungutan ekspor CPO antara subsidi biodiesel dan Minyakita. Selain itu, pemberian insentif yang kompetitif kepada produsen swasta dapat meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Keterbatasan:

Studi ini belum mengukur dampak langsung dari perubahan alokasi subsidi terhadap volume produksi Minyakita, yang dapat menjadi fokus penelitian lanjutan.

#### 5. Opini Publik yang Dipengaruhi oleh Inkonsistensi Kebijakan

Hasil menunjukkan bahwa ketidakjelasan komunikasi kebijakan telah memperkuat persepsi negatif masyarakat. Literasi kebijakan publik menekankan pentingnya konsistensi dan transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat.<sup>45</sup>

Implikasi:

Pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang proaktif dan berbasis data untuk mengurangi kesenjangan antara kebijakan dan ekspektasi masyarakat. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk menyampaikan informasi kebijakan secara langsung kepada masyarakat.

Keterbatasan:

Penelitian ini belum mencakup analisis mendalam terhadap komunikasi publik melalui media sosial, yang kini menjadi saluran utama informasi bagi masyarakat.

#### 6. Dampak pada Kepercayaan Publik dan Stabilitas Pasar

Penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan stabilitas pasar yang terganggu menunjukkan dampak sistemik dari polemik ini. Penelitian tentang tata kelola krisis menyatakan bahwa kepercayaan publik adalah faktor

---

<sup>43</sup> M. Christopher, *Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Added Supply Chains* (London: Pearson Education, 2016), Hal. 32.

<sup>44</sup> World Bank, *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. (Washington, DC: World Bank, 2020), Hal. 37.

<sup>45</sup> Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.), (Thousand Oaks, CA: Sage, 2014), Hal. 114.

kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi selama krisis.<sup>46</sup>

Implikasi:

Pemerintah perlu mengintegrasikan upaya stabilisasi pasar dengan langkah-langkah pemulihan kepercayaan publik, seperti melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik.

Keterbatasan:

Penelitian ini belum mengeksplorasi secara rinci dampak polemik terhadap stabilitas pasar jangka panjang, termasuk pengaruhnya terhadap pelaku UMKM.

## **E. SIMPULAN**

### 1. Simpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa polemik harga Minyakita disebabkan oleh interaksi kompleks antara pemberitaan media, kebijakan pemerintah, dan opini publik. Masalah utama terletak pada panjangnya rantai distribusi, minimnya insentif bagi produsen, serta pemberitaan media yang cenderung fragmentaris. Reformasi kebijakan yang inklusif, transparansi dalam implementasi, dan peran media yang lebih bertanggung jawab diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

### 2. Rekomendasi

- a. Optimalisasi infrastruktur distribusi dengan melibatkan BUMN dan koperasi lokal.
- b. Realokasi dana pungutan ekspor CPO untuk subsidi Minyakita secara lebih signifikan.
- c. Pelatihan jurnalis untuk menyajikan pemberitaan yang lebih berimbang dan kontekstual.
- d. Transparansi kebijakan melalui komunikasi publik yang konsisten dan berbasis data.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Alwi, Alwi., Aslinda, Aslinda., Gita, Susanti. (2019). Cross-Sector Collaboration and Public Policy Accountability: Implementation Network of Food Security Policy in Bone Regency. 88-102. doi: 10.30589/PROCEEDINGS.2019.281
- B. G. Peters, *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration* (New York: Routledge, 2017)
- B. Santoso, Kebijakan DMO dan Dampaknya terhadap Produksi Minyak Goreng di Indonesia (*Jurnal Ilmu Administrasi*, 2022), 17(1)
- B. Sulistiyanto, *Kebijakan Pangan di Indonesia: Analisis Kritis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)
- Badan Pusat Statistik, *Analisis Harga Minyak Goreng di Indonesia* (Jakarta: BPS, 2022)
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indeks Harga Konsumen (IHK)*, (Jakarta: BPS, 2022)
- Chase, Foster., Jeffry, Frieden. (2017). Crisis of Trust: Socio-Economic Determinants of Europeans' Confidence in Government. *Social Science*

---

<sup>46</sup> Seeger et al., *Leadership in Times of Crisis: The Example of Ebola Virus Disease in Africa* (Journal: Global Health Governance, 2016)

- Research Network, doi: 10.2139/SSRN.2953951
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.), (Thousand Oaks, CA: Sage., 2014)
- D. L. Weimer & A. R. Vining, *Policy Analysis: Concepts and Practice*. (New York, NY: Routledge, 2010)
- D. McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory* (London: Sage Publications, 2010),
- D. McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory* (London: Sage Publications, 2010)
- D.A. Scheufele, D. A., & D. Tewksbury, *Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models* (*Journal of Communication*, 2007) 57(1)
- DA. Scheufele, & D. Tewksbury, *Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three Media Effects Models* (*Journal of Communication*, 2007), 57(1)
- E. Bardach, *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving* (Los Angeles: Sage Publications, 2011)
- Fadli, Mappisabbi. (2024). *Strengthening Transparency and Accountability in Bureaucracy to Enhance Public Trust*. 1(4):101-112. doi: 10.61132/epaperbisnis.v1i4.131
- J. Widodo, *Distribusi dan Tata Kelola Pangan di Indonesia* (*Jurnal Ilmu Administrasi*, 2018) 15(1)
- Jemi, Jemi., Desiderius, Sudiby., Rutiana, Wahyuengeseh. (2019). *Challenges to accountability and transparency in implementing discretion in public services in Indonesia*. 60-64. doi: 10.2991/ICONPROCS-19.2019.12
- Jonathan, A., Obar., Jonathan, A., Obar., Amit, M., Schejter., Amit, M., Schejter. (2019). *Distributional Data Justice: Shifting Policy to Address Digital Discrimination in Vulnerable Communities*. *Social Science Research Network*
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Goreng*. (Peraturan ini membahas tentang ketentuan ekspor dan impor minyak goreng, termasuk Domestic Market Obligation (DMO)).
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng*.
- Kristin, Taylor., Stephanie, Zarb., Nathan, Jeschke. (2021). *Ambiguity, Uncertainty and Implementation*. 3(1) doi: 10.4000/IRPP.1638
- M. Christopher, *Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Added Supply Chains* (London: Pearson Education, 2016)
- M. Christopher, *Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Added Supply Chains* (London: Pearson Education, 2016)
- M. Christopher, *Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Added Supply Chains* (London: Pearson Education, 2016)
- M. Christopher, *Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Added Supply Chains* (London: Pearson Education, 2016)
- Manuel, Villoria-Mendieta. (2024). *Trust in government*. doi: 10.1787/8672ebec-en

- Marc, Raboy., David, Taras. (2004). Transparency and accountability in Canadian media policy. *Communications*, 29(1):59-76. doi: 10.1515/COMM.2004.006
- Matthew, Grant., Meredith, Startz. (2022). Cutting Out the Middleman: The Structure of Chains of Intermediation. doi: 10.3386/w30109
- Mocheudi, Martinus, Selepe. (2023). The evaluation of public policy implementation failures and possible solutions. *Eureka: Social and Humanities*, 43-53. doi: 10.21303/2504-5571.2023.002736
- Nurlan, Issekeyev., Diana, Kazbekova. (2024). Economic Incentives as a Mechanism for Employers to Improve Working Conditions. *Университет еңбектеpi*, doi: 10.52209/1609-1825\_2024\_2\_95
- P. Kotler and K. Keller, *Marketing Management*. 13th Edition, (Prentice Hall: New Jersey, 2008)
- P., van, Aelst., Gunnar, Thesen., Stefaan, Walgrave., Rens, Vliegenthart. (2014). Mediatization and political agenda-setting: changing issue priorities?. 200-222. doi: 10.1057/9781137275844\_11
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Pangan dan Pertanian, *Data dan Informasi Pangan*, (Jakarta: PDIKPP, 2022)
- R. Rachma, *Analisis Framing Berita tentang Kebijakan Pemerintah di Media Online (Jurnal Komunikasi*, 2018), 10(1)
- R. Rahmawati, *Analisis Insentif Ekonomi dalam Kebijakan Publik (Jurnal Ilmu Administrasi*, 2020), 17(1)
- R. Rahmawati, *Analisis Koordinasi Antarlembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik (Jurnal Ilmu Administrasi*, 2020), 17(1)
- R. Widyastuti, *Analisis Infrastruktur Logistik dalam Rantai Pasok (Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2020), 20(1)
- R. Widyastuti, *Analisis Kebijakan Subsidi Biodiesel dan Dampaknya terhadap Produksi Minyak Goreng di Indonesia (Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2019), 19(1)
- R. Widyastuti, *Analisis Pengawasan dalam Manajemen Rantai Pasok (Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2020), 20(1)
- RM. Entman, *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm (Journal of Communication*, 1993), 43(4)
- Samuel, Bowles., Sandra, Polania-Reyes. (2012). Economic incentives and social preferences: substitutes or complements?. doi: 10.1257/jel.50.2.368
- Seeger et al., *Leadership in Times of Crisis: The Example of Ebola Virus Disease in Africa (Journal: Global Health Governance*, 2016)
- Siping, Li., Yaoming, Zhou. (2024). Integrating equity and efficiency into urban logistics resilience under emergency lockdowns. doi: 10.1016/j.tre.2024.103446
- Sithileuxay, Vatsalaphone. *Research on Public Political Trust in Public Crisis Management in Laos. Open Journal of Social Sciences*, doi: 10.4236/jss.2024.123006
- T. Besley, & M. Ghatak, *Retailing Public Goods: The Economics of Corporate Social Responsibility (Journal of Public Economics*, 2007), 91(9)
- World Bank, *World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains*. (Washington, DC: World Bank, 2020)